IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERDESAAN DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

(Studi Terhadap Kegiatan Penambahan Permodalan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP) Tahun Anggaran 2007/2008 Di Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman)

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

SKRIPSI

Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Oleh :

MIA ELVENOKSY

BP. 05193003

JURUSAN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TERDAFTAR
TANGGAL : 17-11-09
NOMOR SI : 30909 0269

ABSTRAK

Mia Elvenoksy, No. Bp. 05193003, Implementasi Program PNPM Mandiri Perdesaan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kabupaten Padang Pariaman, Tahun 2007. Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2009. Dibimbing oleh; Drs Tamrin M.Si dan Drs. Rinaldi Eka Putra M.Si. Skripsi ini terdiri dari 101 halaman dengan referensi 13 Buku teori, 6 Metode, 2 Skripsi, 3 Tesis, dan 6 Situs Internet.

Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan kegiatan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan T.A 2007/2008. Fokus penelitian ini di Kabupaten Padang Pariaman yaitu Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya adalah dengan melihat kondisi masyarakat di Sungai Limau dari berbagai aspek, baik dibidang ekonomi, sosial dan politik seperti kurangnya akses melibatkan masyarakat (partisipasi) dalam pengambilan keputusan publik yang menyangkut kehidupan masyarakat secara langsung maka pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan. Melalui program ini dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Hal ini seiring dengan dikeluarkannya keputusan menteriKoordinatorBidangKesejahteraanRakyatNo25/KEP/MENKO/KESRA/VII /2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sementara teknik keabsahan data yang digunakan peneliti memakai proses triangulasi sumber data. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

Penelitian ini mengacu pada teori Implementasi Grindle. Aspek yang dilihat dari kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap masyarakat. Penelitian ini akan meneliti tentang Implementasi kegiatan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) T.A 2007/2008 di Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau yang kurang baik jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya di Kabupaten Padang Pariaman.

Implementasi kegiatan penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) T.A 2007/2008 di Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau berlangsung baik.

Kata kunci : Implementasi Program, PNM Mandiri, Kemiskinan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Persoalan kemiskinan di Indonesia cukup mengkawatirkan bagi semua pihak dengan jumlah penduduk miskin yang terus bertambah, salah satunya diakibatkan oleh krisis moneter. Sebagaimana diketahui, sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan bertambahnya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 1996 jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan diperkirakan 22,5 juta jiwa atau sekitar 11,3 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Dari jumlah ini 7,2 juta jiwa berada di perkotaan atau 9,7 persen dari seluruh penduduk perkotaan, dan 15,3 juta jiwa atau 12,3 persen dari seluruh penduduk perdesaan.[1]

Akibat krisis ekonomi yang berkelanjutan, sampai dengan akhir tahun 1998, jumlah penduduk miskin telah menjadi 49,5 juta jiwa, atau sekitar 24,2 persen dari jumlah penduduk Indonesia.[2] Penyebabnya *pertama* karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dan *kedua*, kenaikan harga pangan.[3] Data BPS menyebutkan Februari 1999 jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat sebesar 48,4 juta jiwa, atau 67,6 persen. Agustus 1999 tingkat kemiskinan turun menjadi 37,5 juta atau 18,2 persen akibat turunnya harga-harga, terutama harga pangan sejak triwulan II tahun 1999. Pada tahun 2000 jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat sebesar 38,7 juta jiwa atau sekitar 19,14 persen, yang

[1] Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2009

[2] *Ibid.*

[3] H. Muslim Kasim, Ak,M.M, *Karakteristik Kemiskinan Di Indonesia & Strategi Penanggulangannya* : Studi Kasus Padang Pariaman, Indomedia Global, Jakarta,2006, hlm.27.

tersebar di perkotaan sebesar 12,3 juta dan di perdesaan sebesar 26,4 juta.[4]Februari 2002 jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat sebesar 38,4 juta jiwa atau 65,36 persen. Februari 1999 jumlah penduduk miskin tersebut mengalami penurunan sebesar 9.57 persen. Februari 2003, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 37,3 juta jiwa atau 17,42 persen. Tahun 2002 jumlah penduduk tersebut menurun sekitar 2,86 persen. Sementara itu pada Februari 2004, jumlah penduduk miskin tercatat sekitar 36,1 juta jiwa atau 16,66 persen. Di banding tahun 2003 jumlah tersebut menurun sekitar 3,22 persen.[5] Seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia 1996-2007

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta orang)	Persentase Penduduk Miskin (Juta Orang)
1	1996	22,5	11,34
2	1997	34,0	17,47
3	1998	49,5	24,23
4	1999	47,9	23,43
5	2000	38,7	19,14
6	2001	37,9	18,41
7	2002	38,4	18,20
8	2003	37,3	17,42
9	2004	36,2	16,66
10	Feb2005	35,1	15,97
11	Juli2005	36,80	16,69
12	Mrt2006	39,30	17,75
13	Mrt2007	37,17	16,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman 2008.

Data BPS Kabupaten Padang Pariaman menyebutkan jumlah penduduk di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2005 384.398 jiwa, tahun 2006 meningkat menjadi 384.718 jiwa dan tahun 2007 387.452 jiwa. Jumlah penduduk miskin di

[4] *Ibid.*
[5] *Ibid.*

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan di pengaruhi oleh lingkungan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Grindle dipengaruhi oleh Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat artinya strategi yang digunakan dalam proses, kekuasaan, dan badan pelaksana ataupun elit politik dan penguasa setempat akan mempengaruhi implementasi kebijakan.

Kekuasaan berarti fungsi dari aktor penyelenggara kebijakan program tersebut dimana fungsi tersebut semuanya diatur dalam pedoman umum PNPM-MP. Kegiatan SPP melibatkan aktor pemerintahan baik dari pihak kabupaten, perdesaan maupun kecamatan serta masyarakat setempat. Dari pihak kabupaten misalnya tim koordinasi PNPM-MP kabupaten fungsinya sebagai pembina pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program PNPM-MP. Dari pihak kecamatan seperti camat fungsinya sebagai pembina pelaksanaan PNPM-MP kepada desa-desa di wilayah kecamatan, selain itu camat juga bertugas untuk membuat Surat Penetapan Camat (SPC) tentang usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati musyawarah antar desa untuk didanai melalui PNPM-MP.

Pihak Perdesaan seperti wali korong fungsinya sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PNPM-MP. Dari kalangan

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

masyarakat fungsinya sebagai pemanfaat program dimana dalam kegiatan SPP ini adalah perempuan. Dalam penelitian ini pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sungai Limau dinilai berhasil, hal ini tidak terlepas dari peran serta yang baik dari pelaku perdesaan, kecamatan maupun Kabupaten dan partisipasi dari masyarakat dalam menentukan arah kegiatan program yang akan dijalankan melalui Musyawarah Antar Desa (MAD). Kerberhasilan ini dapat dilihat dari masuknya Kecamatan Sungai Limau kedalam tiga besar kecamatan terbaik dalam menjalankan kegiatan Simpan Pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) Perdesaan di Kabupaten Padang Pariaman.

Karakteristik lembaga dan penguasa artinya kondisi dan keberadaan badan pelaksana yang didukung otoritas penguasa akan dimana dilapangan ditemukan pelaku perdesaan seperti aparatur desa selalu dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini terlihat melalui musyawarah terutama jika terkait langsung dengan masalah yang sangat sensitif di masyarakat seperti bantuan proyek atau dana bergulir ini menjadikan pimpinan desa maupun aparatur desa sebagai media pengambilan keputusan. Sebenarnya hal seperti ini tidak ditulis di pedoman umum PNPM-MP. Di Kecamatan Sungai Limau kendala yang ditemui di lapangan adalah kurang lancarnya pengembalian modal pinjaman ke UPK. Ini terjadi karena keterbatasan keuangan dari sipeminjam dalam mengembalikan pinjaman akibat usaha yang dijalankan kurang berhasil, selain itu juga terdapat oknum dalam masyarakat yang mempengaruhi peminjam agar tidak mengembalikan uang pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teori

Asnawi, Sjofjan. 1999. *Pengembangan Wilayah Pedesaan*. Universitas Andalas Padang : PSI-SDALP.

Direktorat Dalam Negeri Jenderal Pemberdayaan Masyarakat,2008. *Profil PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Sumatra Barat*,Jakarta.

Direktorat Dalam Negeri Jenderal Pemberdayaan Masyarakat.2008. *Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan*,Jakarta.

Halim, Rr,Suhartini, Imam Khambali Abd Basyid. 2005. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: PT Pelangi Aksara.

Islamy, M. Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kasim, Muslim. 2006. *Karakteristik Kemiskinan Di Indonesia & Strategi Penanggulangannya. Studi Kasus Padang Pariaman*. Jakarta : Indomedia Global.

N. Dunn, William. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Unversity Press.

Nugroho ,Riant. 2003. *Kebijakan Publik,Formulasi,Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia.

R. Wrihatnolo Randy dan Riant Nugroho, 2007. *Manajemen Pemberdayaan*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Syaukani, dkk. 2003. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.